



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

TAHUN 2025

KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA



KATA PENGANTAR

Sege nap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena tim penyusun LKj Kecamatan Sungai Pinang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada Masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Pinang.

Kinerja Kecamatan Sungai Pinang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan unsur wilayah ditahun mendataKami menyadari bahwa dalam peyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan, kepada para pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 26 Februari 2025
Plt. Camat Sungai Pinang

MOHAMAD JONI, SE
NIP. 19690824 199803 1 007





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 sekaligus memenuhi amanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisikan Gambaran Umum, Perencanaan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah OPD yang melayani sektor publik, Kecamatan Sungai Pinang mempunyai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis yang hendak dicapai demi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Dari uraian diatas dan mengacu dengan tujuan Kota Samarinda, maka Kecamatan Sungai Pinang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
2. Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel

Sasaran merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana Pemerintah yang harus dilaksanakan agar menjadi dasar pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, serta meningkatkan kesadaran organisasi terhadap kemungkinan adanya permasalahan karena tidak tercapainya harapan.

Dari uraian tersebut diatas, Kecamatan Sungai Pinang menetapkan sasaran strategis dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah
- b) Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB. I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi.....	4
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Sumber Daya Aparatur.....	13
E. Aspek Strategis dan Permasalahan.....	14
F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	16
G. Sistematika Penyajian.....	19
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis.....	21
1. Visi dan Misi.....	22
2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	24
3. Strategi dan Kebijakan.....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	29
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
B. Realisasi Anggaran.....	54
C. Prestasi/ Penghargaan.....	XX
BAB. IV PENUTUP.....	68
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan Sungai Pinang merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis kewilayahan pada Pemerintah Kota Samarinda.

Sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan, wilayah kerja Kantor Kecamatan Sungai Pinang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang , terdiri dari 5 Kelurahan yaitu, Kelurahan Bandara, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Gunung Lingai , Kelurahan Temindung Permai dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Walikota yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

B. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

➤ Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP
2. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Lakip dan tata cara review



3. Permenpan 88 Tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP
4. Peraturan Walikota Samarinda No.11 Tahun 2024 tentang pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda
5. Permenpan 22 Tahun 2024 tentang penilaian Kinerja Organisasi

➤ **Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 024 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Kecamatan Sungai Pinang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi.

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan di lingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan SKPD terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis;
- e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.



TUGAS DAN FUNGSI

CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
 - c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - i. penyelenggaraan layanan umum di tingkat Kecamatan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kerjanya;
 - k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - l. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.



SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengkoordinasian pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - e. pelaksanaan program Sekretaris;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
 - g. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan keuangan Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat



- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;



- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyiapan bahan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- j. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan;



- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- f. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan;
- g. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Sungai Pinang sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda terdiri dari 7 Bidang dengan rincian sebagai berikut:

- **Camat.**
- **Sekretaris Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas :**
 - a. **Sub Bagian Perencanaan Program & Keuangan**
 - b. **Sub Bagian Umum**
- **Seksi Pemerintahan Umum & Trantib**
- **Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan Masyarakat**
- **Seksi Kebersihan & Lingkungan Hidup**
- **Seksi Ekonomi Pembangunan**
- **Seksi Pelayanan Umum**



Dan Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari 5 Kelurahan :

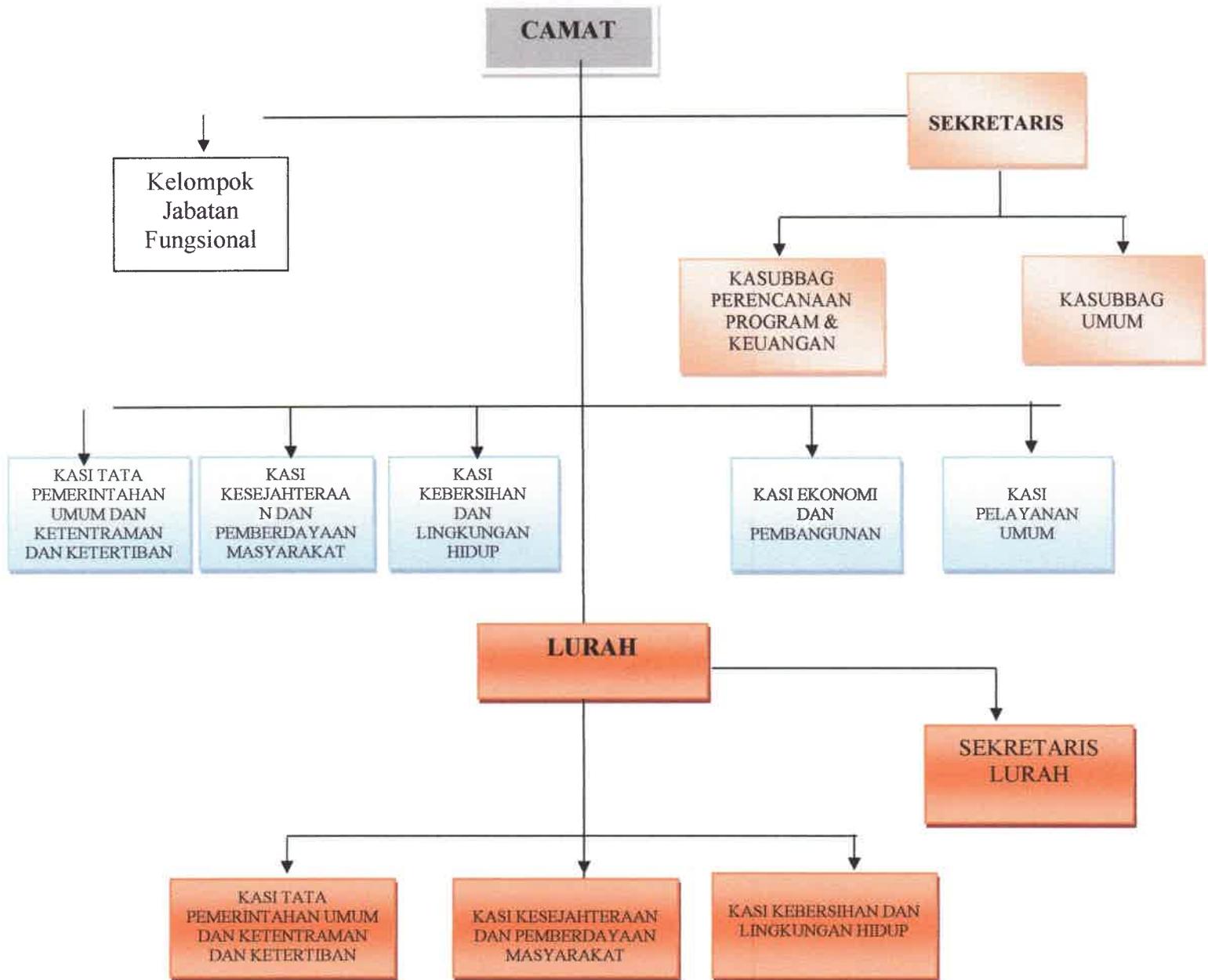
- **Kelurahan Temindung Permai**
- **Kelurahan Sungai Pinang Dalam**
- **Kelurahan Bandara**
- **Kelurahan Gunung Lingai**
- **Kelurahan Mugirejo**

Dengan Susunan Organisasi satuan kerja Kelurahan terdiri atas :

- **Lurah**
- **Sekretaris Lurah**
- **Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban**
- **Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**
- **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**



Tabel 2.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda





D. SUMBER DAYA APARATUR

Sampai dengan bulan Desember 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Sungai Pinang dan 5 (lima) Kelurahan Kota Samarinda sebanyak 64 orang dan Pegawai Non ASN sebanyak 63 orang dengan rincian sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Kecamatan Sungai Pinang

Sampai dengan bulan Desember 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Sungai Pinang dan 5 (lima) Kelurahan Kota Samarinda sebanyak 64 orang dan Pegawai Non ASN sebanyak 63 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Kecamatan Sungai Pinang

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	64
2	PTT	63
	Jumlah	169

Dengan melihat pada kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut di atas, jumlah SDM di Kecamatan Sungai Pinang Dan Kelurahan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Tetapi dari segi kualitas harus lebih ditingkatkan dalam mencapai Pelayanan Prima karena lebih dari 50% pegawai merupakan lulusan S1 dan S2.



Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	14
2	Golongan III	48
3	Golongan IV	2
Jumlah		64

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai.

E. ASPEK STRATGIS DAN PERMASALAHAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan aspek strategis Kecamatan Sungai Pinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Sungai Pinang yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Aspek Strategis Kecamatan Sungai Pinang
 - a. Struktur Organisasi dan tata kerja di Kecamatan Sungai Pinang berdasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah, wilayah, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kota Samarinda.
 - b. Dibutuhkan mekanisme teknis mengenai hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD lain. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.



2. Berdasarkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
 - a. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam pembangunan Pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah harus didorong sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Meningkatkan partisipasi pemuda, dan kalangan usia produktif Pemuda, kalangan usia produktif didorong dalam usaha mandiri untuk meningkatkan produktifitas hasil kerajinan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan usaha. Berdasarkan prosedur.
3. Operasional pelayanan PATEN Pelayanan PATEN yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai slogan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Pinang harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif dan dikomunikasikan kepada masyarakat. PATEN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Sarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa ruang kerja staf. Selain itu Kecamatan Sungai Pinang yang dilengkapi dengan peralatan seperti Komputer, printer dan fasilitas kerja lainnya. Sarana dan prasana tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.



F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Tabel 2.4

Progres Nilai AKIP Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022-2023

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2023	46.25	C

Tabel 2.5

Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Membuat Dokumen Teknis Perencanaan Kinerja	Melengkapi dokumen teknis kinerja
2	Membuat Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek	Membuat dokumen kinerja jangka pendek
3	Membuat Dokumem Perencanaan Anggaran yang mendukung kinerja (KAK / RAB / HPS / RUP)	Membuat bukti dukung KAK
4	Membuat Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	Melengkapi dokumen
5	Membuat dokumen perencanaan kinerja yang seluruhnya di formalkan	Memformalkan semua dokumen
6	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tidak hanya di website opd, namun juga ke website Menpan	Publikasikan ke Menpan
7	Membuat Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang memenuhi kriteria SMART beserta kertas kerja pendukungnya;	
8	Membuat dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi / hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	Melengkapi dokumen tersebut
9	Membuat dokumen Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar	Melengkapi dokumen tersebut



	bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting);	
10	Melaksanakan aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai;	
11	Membuat dokumen Rencana aksi kinerja yang selalu dipantau secara berkala;	Membuat dokumen rencana aksi berkala
12	Membuat perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi / hasil yang lebih baik;	Melengkapi dokumen tersebut
13	Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan mengunggah seluruh dokumen SKP untuk seluruh pegawai Kecamatan;	Melengkapi dokumen tersebut
14	Mendefinisikan operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;	
15	Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;	Melengkapi dokumen tersebut
16	Melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja;	
17	Mengumpulkan Data kinerja yang relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;	Melengkapi dokumen tersebut
18	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala;	Melengkapi dokumen tersebut
19	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang untuk setiap level organisasi;	Melengkapi dokumen tersebut
20	Mengumpulkan dan mengukur data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) sepenuhnya;	Melengkapi dokumen tersebut
21	Melakukan Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
22	Melakukan Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut



23	Melakukan Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
24	Melakukan Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
25	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
26	Hasil pengukuran kinerja dipahami dan menjadi kepedulian setiap pegawai dengan membuat dokumen pendukung penilaian prestasi pegawai triwulan	Melengkapi dokumen tersebut
27	Memformalkan dokumen Laporan Kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
28	Mempublikasikan Laporan Kinerja tidak hanya ke website OPD, namun juga ke website Menpan;	Melengkapi dokumen tersebut
29	Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu;	Melengkapi dokumen tersebut
30	Membuat Dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;	Melengkapi dokumen tersebut
31	Membuat Dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi / Nasional;	Melengkapi dokumen tersebut
32	Membuat Dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
33	Menyajikan informasi dalam Laporan Kinerja yang menjadi kepedulian seluruh pegawai;	Melengkapi dokumen tersebut
34	Menyajikan Informasi dalam Laporan Kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
35	Menyajikan Informasi dalam Laporan Kinerja berkala yang digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
36	Menyajikan Informasi dalam Laporan Kinerja yang digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut



37	Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;	Melengkapi dokumen tersebut
38	Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;	Melengkapi dokumen tersebut
39	Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai;	Melengkapi dokumen tersebut
40	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;	Melengkapi dokumen tersebut
41	Melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar terjadi peningkatan implementasi SAKIP.	Melengkapi dokumen tersebut

G. SISTEMATIK PENYAJIAN

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB. I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
- c. Struktur Organisasi
- d. Sumber Daya Aparatur
- e. Aspek Strategis dan Permasalahan
- f. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023
- g. Sistematika Penyajian

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
3. Strategi dan Kebijakan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi/ Penghargaan

BAB. IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2024 menguraikan target Kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang selama tahun 2024. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan Benchmark (Studi Banding) dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam rencana kerja Tahun 2024 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1) **Visi Dan Misi**

Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.



Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda bertekad untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda menetapkan visinya adalah :

“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban ”

2) Misi

Misi adalah Suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yaitu sebagai berikut :

Misi :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi dengan memberi Ruang bagi partisipasi masyarakat

Strategi :

- Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik
- Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata kelola Pemerintahan

Kebijakan :

- Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik
- Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2024.

Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Tujuan Kecamatan Sungai Pinang

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2021	Target Tahun 2026
Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka Indeks Pelayanan Publik	Nilai	98.49	82.00
Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan yang disetujui		Persen	-	80 %



B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan kapabilitas Masyarakat Dikelurahan

Berdasarkan sasaran kecamatan sungai pinang, adapun Indikator sasaran kecamatan sungai pinang adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan



Tabel 2.7

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		93.63	80.55	81.00	81.55	82.00
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		50%	60%	70%	75%	80%

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sungai Pinang Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2021-2026.



Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik			80.55	81.00	81.55	82.00	
Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			60 %	70%	75%	80%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM			80.55	81.00	81.55	82.00	

Tabel 2.9
Adapun IKU Kecamatan Sungai Pinang
Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80,00	93,63	80.55	81.00	81.55	82.00
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	50%	50%	60%	70%	75%	80%

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

a. Strategi

Untuk merelisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi Kecamatan Sungai Pinang adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah
Strategi : Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik
2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
Strategi : Reformasi birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan



b. Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda memiliki 2 Arah Kebijakan resmi yaitu :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Lebih Baik.
2. Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
Kecamatan Sungai Pinang

Visi : Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota pusat peradaban			
Misi :Mewujudkan Pemerintahan yang professional, transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan sistem pelayanan publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih Baik
Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat dikelurahan	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat



dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.00
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sungai Pinang	70 %

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 3 program yang dijabarkan dalam 9 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan pada Tahun 2024.

Pembagian program dan kegiatan dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah ***“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”***, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tahun 2024 terdiri dari :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - 1.Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang
 - 2.Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai
 3. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam
 - 4.Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Bandara
 - 5.Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai
 - 6.Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai Pinang Kelurahan Mugirejo
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan
 2. Evaluasi Kelurahan



3. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Temindung Permai
 4. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam
 5. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Bandara
 6. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingai
 7. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Mugirejo
 8. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai
 9. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam
 10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara
 11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai
 12. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo
- b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
1. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Sungai Pinang)
 2. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Temindung Permai)
 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Sungai Pinang Dalam)
 4. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Gunung Lingai)
 5. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Bandara)
 6. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Mugirejo)
- 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- c. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - 2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
 - 4. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan
 - 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pengadaan Mebel
 - 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas perorangan dinas operasional lapangan
 - 3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pelaporan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Sungai Pinang.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian terdapat juga beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan.



Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/ kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- a. 80 – 100 = Baik
- b. 50 - 79 = Cukup
- c. Dibawah 50 = Kurang

2. Analisis Pencapaian Kinerja

Hingga akhir Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil Pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	90,4	90,4
2	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	70 %	99.62	99.96

Analisis pencapaian indicator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kinerja sasaran kecamatan sungai pinang yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 terealisasi dengan nilai 90.40 atau target 81.00 telah mencapai nilai 90.40 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data hasil nilai indeks kepuasan masyarakat



(IKM) ini bersumber dari pengukuran IKM selama tahun 2024. Pengukuran dilakukan secara berkala per Triwulan. Dari hasil survey kepuasan masyarakat indicator kinerja ini menunjukkan semua unsur pelayanan menunjukkan kualitas pelayanannya sudah BAIK.

2. Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

pengukuran indicator kedua yaitu persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat masyarakat di wilayah kecamatan sungai pinang, dimana pada tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 99.62 dari target 70 %, angka 99.62 Ini diperoleh dari pengukuran indicator pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan pada masing masing RT yang terdapat 5 (lima) kelurahan se kecamatan Sungai Pinang selama tahun 2024.

Nilai yang di peroleh tersebut berdasarkan pencapaian persentase realisasi keuangan maupun realisasi kinerja dari 5 (lima) kelurahan sekecamatan sungai pinang dalam menjalankan program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan maupun pemberdayaan masyarakat di kelurahan selama tahun 2024. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis diperoleh gambaran bahwa indicator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 99.62 yang mempunyai makna sangat berhasil.

Persentase realisasi keuangan dan realisasi kinerja dari program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan maupun pemberdayaan masyarakat di 5 (lima) kelurahan sekecamatan sungai pinang disajikan pada table yang tersaji di bawah ini :



Tabel 3.4

**Persentase realisasi keuangan dan realisasi kinerja
Program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan &
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Se-Kecamatan Sungai Pinang
Tahun 2024**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Satuan	%
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Temindung Permai)	2.789.400.000	2.789.400.000	100	29	29	RT	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sungai Pinang Dalam)	8.047.400.000	8.047.400.000	100	39	39	RT	100
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bandara)	2.081.500.000	2.081.500.000	100	23	23	RT	100
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Gunung Lingai)	1.661.500.000	1.659.190.000	99.86	43	43	RT	99.86
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Mugirejo)	3.069.400.000	3.069.399.950	100	114	114	RT	100
6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Temindung Permai)	1.697.913.800	1.697.913.682	100	3	3	Pokmas/ Ormas	100
7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Pinang Dalam)	4.871.994.000	4.871.994.000	100	3	3	Pokmas/ Ormas	100
8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bandara)	4.275.756.400	1.275.449.296	99.98	2	2	Pokmas/ Ormas	99.98
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gunung Lingai)	1.014.562.000	1.013.980.500	99.94	4	4	Pokmas/ Ormas	99.94
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mugirejo)	1.866.776.700	1.866.550.173	99.99	11	11	Pokmas/ Ormas	99.99



2. Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.00	89.18	80.55	89.23	81.00	90.4
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	50%	100	60%	100	70 %	99.96

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85.81	89.18	89.23	90.4
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		100	100	100	99.96

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)

Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.7
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
				2024	2024
NIHIL					

Dikarenakan Kecamatan tidak melaksanakan urusan wajib layanan dasar, sehingga tidak ada indikator SPM.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Faktor yang mendukung keberhasilan :

- Adanya penambahan Sarana dan Prasarana didalam melakukan Pelayanan kepada Masyarakat ;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Realisasi anggaran dimanfaatkan dengan tepat sehingga kebutuhan operasional dapat terakomodir dengan baik, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

b. Faktor - faktor yang menjadi hambatan :

- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan probebaya (Pokmas) dalam menyerahkan pertanggung jawaban penggunaan keuangan ke kelurahan
- Kurangnya Koordinasi antara Pokmas dengan Kelurahan.

c. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat dalam mencapai sasaran indikator Kinerja maka solusi yang diharapkan adalah :

- Memberikan sosialisasi kepada pokmas terkait pentingnya penyampaian laporan keuangan tepat waktu kepada pokmas probebaya
- Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk menambah SDM di Kecamatan Dan Kelurahan
- Membuat forum komunikasi antara pokmas dan kelurahan antara agar sinegritas pelaksanaan probebaya lebih meningkat



6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Renstra. Adapun sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda guna mencapai target sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan sehingga target dalam sasaran strategis Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dapat tercapai. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	90.4	90,4	Rp. 2.940.880.000	Rp. 2.905.812.390	98,81 %
Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	70%	99.62	99,62	Rp. 28.790.361.500	Rp. 28,778,711,963	99,96 %

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dan wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Pinang.



Dalam rangka peningkatan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024, maka perlu dilakukan beberapa strategi dalam mencapai tujuan Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut:

- 1) Mensinergikan program pelayanan dengan OPD yang menjadi tanggung jawab Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Keselarasan data kependudukan;
- 3) Keselarasan data penerima bantuan pemerintah;
- 4) Meningkatkan peran serta lembaga sosial dan komunitas;
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah;
- 6) Mensinergikan program pembangunan infrastruktur OPD dengan program di Kecamatan dan Kelurahan;
- 7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengusulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 8) Adapun arah kebijakan Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik instansi vertical maupun horizontal terkait sarana dan prasarana di Kecamatan Sungai Pinang
- 9) Penerapan sistem manajemen pelayanan yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, nyaman, aman, jelas serta terjaga profesionalisme petugas pelayanan;
- 10) Menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
- 11) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta mensinergikan basis data kependudukan;



- 12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengoptimalkan layanan dasar kesehatan dan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- 13) Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang membidangi Ekonomi kreatif;
- 14) Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bidang ekonomi kreatif, lingkungan, kemasyarakatan, dan keagamaan;
- 15) Mengintegrasikan basis data UMKM antara OPD yang membidangi dengan Kecamatan Sungai Pinang;
- 16) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan serta melakukan pendampingan sehingga terwujud pembinaan yang berkelanjutan.
- 17) Meningkatkan peran serta lembaga sosial masyarakat;
- 18) Meningkatkan peran serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 19) Meningkatkan peran serta RT dan Linmas;
- 20) Meningkatkan indeks rasa aman, gotong royong dan toleransi;
- 21) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
- 22) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
- 23) Menciptakan stabilitas keamanan wilayah Kecamatan Sungai Pinang.

Dengan Upaya perbaikan kinerja maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai Pinang semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2024 sebagaimana dengan tabel berikut :



Tabel 3.9
Analisa Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Program Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 Dokumen	12 Dokumen	100	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		



			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan	248 unit	248 unit	99,62	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	29 Unit	29 Unit		



			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	39 Unit	39 Unit		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	23 Unit	23 Unit		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mugirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	43 Unit	43 Unit		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	114 Unit	114 Unit		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas		



			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas		
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang di bina	248 keluarga	248 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 keluarga	248 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bandara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	29 keluarga	29 keluarga		



			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan <u>Temindung Permai</u>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39 keluarga	39 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan <u>Gunung Lingai</u>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	23 keluarga	23 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan <u>Mugirejo</u>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43 keluarga	43 keluarga		
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan <u>Sungai Pinang Dalam</u>	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	114 keluarga	114 keluarga		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai IKM		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	81	81	99.76	



DAERAH KABUPATEN/KOTA								
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dpkumen	1 Dpkumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	13 Laporan	13 Laporan		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	70 Orang		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	11 Laporan	11 Laporan		



				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	34 orang	34 orang		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Penyediaan Administrasi Umum	8 Laporan	8 Laporan		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		



			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	17 Unit	17 Unit		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7 Unit	7 Unit		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	6 Unit	6 Unit		
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	1 Unit		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	1 Unit		



				Lainnya yang disediakan				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	46 Unit	46 Unit		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	14 Unit	14 Unit		



			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				
			Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	14 Unit		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	6 Unit		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	nit	6 Unit		



8. Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun Anggaran sebesar Rp. 47.851.116.382,- Dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 47.526.059.278,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 99.14 %, dengan Silpa Rp. 11.649.537,-

Pencapaian Kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada kecamatan sungai pinang tahun 2024 berhasil dalam mencapai sasaran, adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.1

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentasi Realisasi Anggaran
				Rp	Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			16.119.874.882	15.841.534.925	98.27 %
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			150.000.000	148.757.858	99.17



Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		75.000.000	73.768.597	98.36
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		50.000.000	49.998.961	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.000.000	24.990.300	99.96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.053.802. 245	12.870.628.0 06	98.60
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN		10.608.784. 146	10.450.281.2 72	98.51
	Penyediaan Administrasi	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		2.075.018.0 99	2.059.899.30 9	99.27



	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN			
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	370.000.000	360.447.425	97.42
Administrasi Umum Perangkat Daerah			973.134,250	972.839.825	99.97
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	77.956.000	77.956.000	100
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	625.000.000	624.955.000	99.99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor Yang Disediakan	59.448.000	59.446.000	100
	Penyediaan Barang Cetak	laporan realisasi anggaran yang	55.998.250	55.860.425	99.75



		dan Penggandaan	dicetak atau digandakan			
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan Dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3.000.000	3.000.000	100
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	12.000.000	100
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	139.732.000	139.622.400	99.92
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	905.615.055	905.585.000	100
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	189.570.000	189.570.000	100
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau	445.590.000	445.590.000	100



		lapangan yang disediakan			
		Pengadaan Mebel		86.305.055	86.275.000 99.97
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		183.750.000	183.750.000 100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			437.208.331	400.051.442 91.50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		395.208.331	358.051.442 90.60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan		42.000.000	42.000.000 100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600.115.001	543.672.794 90.59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan Dinas Perorangan		128.210.500	96.208.983 75.04



		Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan diabayakan pajak dan perizinanya	88.000.000	63.560.845	72.23
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Yang dipelihara	53.550.000	53.550.000	100
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	330.354.501	330.352.966	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.940.880.000	3.946.341.642	97.13



	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.940.880.000	2.905.812.390	98.81
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sungai Pinang)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	1.483.480.000	1.468.190.626	98.97
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kel. Temindung Permai)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	408.000.000	406.350.000	99.60
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kel. Sungai Pinang Dalam)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	275.400.000	264.198.950	95.93
		Peningkatan Efektifitas	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	258.000.000	256.034.241	99.24



		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kel. Bandara)	Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kel. Gunung Lingai)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	258.000.000	255.420.941	99.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kel. Mugirejo)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di tingkat Kecamatan	258.000.000	255.617.632	99.08
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun dan jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	28.790.361. 500	28.778.711.9 63	99.96
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			28.440.361. 500	28.429.350.4 81	99.96



		Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	24.100.000	24.098.975	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Temindung Permai)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	2.789.400.000	2.789.400.000	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sungai Pinang Dalam)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	8.047.400.000	8.047.400.000	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bandara)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	2.081.500.000	2.081.500.000	100
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Gunung Lingai)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	1.661.500.000	1.659.190.000	99.86



	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel Mugirejo)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun dikelurahan	3.069.400.000	3.069.399.950	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Temindung Permai)	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1.697.913.800	1.697.913.682	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Pinang Dalam)	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	4.871.994.000	4.871.994.000	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bandara)	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	4.275.756.400	1.275.449.296	99.98
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gunung Lingai)	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1.014.562.000	1.013.980.500	99.94
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mugirejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1.866.776.700	1.866.550.173	99.99
	Evaluasi Kelurahan		40.058.600	33.001.400	82.38
Kegiatan Pemberdayaan dan		Jumlah Keluarga yang dibina	350.000.000	349.361.482	99.82



Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan						
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	100.000.000	99.658.000	99.66
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat (Temindung Permai)	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	50.000.000	50.000.000	100
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	50.000.000	49.982.241	99.96



		masyarakat (Sungai Pinang Dalam)				
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat (Bandara)	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	50.000.000	49.999.241	100
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat (Gunung Lingai)	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	50.000.000	49.924.000	99.85
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok masyarakat	50.000.000	49.798.000	99.60



		masyarakat (
		Mugirejo)				



Tabel 4.2
Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	16.119.874.882	15.841.534.925	98.27	278.339.957
2	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.940.880.000	2.905.812.390	98.81	35.067.610
3	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	28.790.361.500	28.778.711.963	99.96	11.649.537
	Jumlah	47,851,116,382	47,526,059,278	99.14	11,649,537

- Analisis Penggunaan Dana Tahun 2024

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda DPA Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan total nilai keseluruhan Belanja adalah sebesar Rp. **47.851.116.382** sedangkan realisasi anggaran Belanja mencapai Rp. **47.526.059.278,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **99.14 %**, dengan sisa Pagu Rp. **11.649.537,-** Dilihat dari tabel laporan realisasi capaian anggaran tahun 2024, penyerapan anggaran tahun 2024 untuk Kecamatan SungaiPinang secara umum menunjukkan hasil yang relative baik, terlihat dari hasil Persentase capaian penyerapan anggaran yang mencapai **99.14 %**.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. LAPORAN KINERJA (LKj) ini disusun sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 13/5278JDI.PAN-RBI1212014 tentang penyampaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor 000.8.6.3/003/013.02 tanggal 03 Januari 2024 tentang mekanisme pengumpulan Data Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Samarinda.

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Sungai Pinang terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2024 umumnya menggambarkan kinerja yang optimal. Dari 2 sasaran strategi yang ditetapkan dalam rencana strategik hampir semua telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dicapai secara optimal.

Dengan LAPORAN KINERJA (LKj) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Samarinda, 26 Februari 2025
Plt. Camat Sungai Pinang

MOHAMAD JONI, SE
NIP. 19690824 199803 1 007



LAMPIRAN

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas, dan kapabilitas masyarakat di kelurahan	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	70%

Samarinda, 5 Februari 2024
Kecamatan Sungai Pinang



HD. SIYIHASANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19630707 195803 2 019

**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,00				90,40
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	70%	2,03	7,55	51,11	99,96

Samarinda, 26 Februari 2025

Kecamatan Sungai Pinang



MOLHAMAD JONI, SE

NIP. 19690824 199803 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2024**

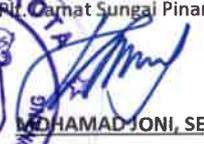
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI		
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Tarif Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukkan 9. Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	Perwali Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Dilaksanakan dibagi Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Dikali 100	Kecamatan	Data Diambil Dari Laporan Realisasi Anggaran atau E - Dalev


 26 Februari 2025
 Plt. Camat Sungai Pinang
MUHAMMAD JONI, SE
 NIP. 19690821 199803 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		TARGET SASARAN TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI			
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	81,00	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Tarif Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	Perwali Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Dilaksanakan dibagi Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Dikali 100	70%	Kecamatan	Data Diambil Dari Laporan Realisasi Anggaran atau E - Dalev

Marinda, 26 Februari 2025
Pir. Camat Sungai Pinang


MUHAMMAD JONI, SE
NIR. 11690824 199803 1 007



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2021 - 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		TARGET SASARAN						SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)			80,55	81,00	81,55	82,00	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Tarif Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	Perwali Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Dilaksanakan dibagi Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Dikali 100			60%	70%	75%	80%	Kecamatan	Data Diambil Dari Laporan Realisasi Anggaran atau E - Dalev

Samarinda, 26 Februari 2025
Kepala Kecamatan Sungai Pinang


MOHAMAD JONI, SE
NIP. 19690221 199803 1 007



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2021 - 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024				SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	81,00				90,40	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya Tarif Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksanaan Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukkan 9. Sarana dan Prasarana
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	Perwali Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Dilaksanakan dibagi Jumlah Pagu Anggaran Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Dikali 100	70%	2,03	7,55	51,11	99,96	Kecamatan	Data Diambil Dari Laporan Realisasi Anggaran atau E - Dalev

Samarinda, 26 Februari 2025
Pdt. Camat Sungai Pinang


MUHAMMAD JONI, SE
NIP. 19680824 199803 1 007



**PENGUNAAN ANGGARAN
KECAMATAN SUNGAI PINANG
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM		ANGGARAN (Rp) TERKAIT	REALISASI (Rp)	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp) TERKAIT	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN	
			URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM			SUB KEGIATAN	INDIKATOR		(Rp)	KEU (%)
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IKM	16.119.874.882	15.841.534.925	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Rp 150.000.000	Rp 148.757.858	99,17
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 75.000.000	Rp 73.768.597	98,36
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Rp 50.000.000	Rp 49.998.961	100,00
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.000.000	Rp 24.990.300	99,96
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Rp 13.053.802.245	Rp 12.870.628.006	98,60
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang menerima Gaji dan	Rp 10.608.784.146	Rp 10.450.281.272	98,51
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi	Rp 2.075.018.099	Rp 2.059.899.309	99,27
							Kordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Rp 370.000.000	Rp 360.447.425	97,42
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Rp 973.134.250	Rp 972.839.825	99,97
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp 77.956.000	Rp 77.956.000	100,00
							Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp 625.000.000	Rp 624.955.000	99,99
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Rp 59.448.000	Rp 59.446.000	100,00
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Rp 55.998.250	Rp 55.860.425	99,75
							Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan peraturan Perundang - undangan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00

						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	100,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan	Rp 139.732.000	Rp 139.622.400	99,92
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Rp 905.615.055	Rp 905.585.000	100,00
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Rp 189.570.000	Rp 189.570.000	100,00
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Di	Rp 445.590.000	Rp 445.590.000	100,00
						Pengadaan Mebel		Rp 86.305.055	Rp 86.275.000	99,97
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp 183.750.000	Rp 183.750.000	100,00
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Rp 437.208.331	Rp 400.051.442	91,50
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	Rp 395.208.331	Rp 358.051.442	90,60
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	100,00
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Rp 600.115.001	Rp 543.672.794	90,59
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Rp 128.210.500	Rp 96.208.983	75,04
						Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp 88.000.000	Rp 63.560.845	72,23
						Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang dipelihara	Rp 53.550.000	Rp 53.550.000	100,00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Rp 330.354.501	Rp 330.352.966	100,00

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik		Rp 3.946.341.642	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindaklanjuti	Rp 2.940.880.000	Rp 2.905.812.390	98,81
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 1.483.480.000	Rp 1.468.190.626	98,97
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Temindung Permai)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 408.000.000	Rp 406.350.000	99,60
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Pinang Dalam)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 275.400.000	Rp 264.198.950	95,93
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Bandara)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 258.000.000	Rp 256.034.241	99,24
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Gunung Lingai)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 258.000.000	Rp 255.420.941	99,00
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Mugirejo)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 258.000.000	Rp 255.617.632	99,08
	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Yang terbangun dan jumlah Pokmas dan			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun di Kelurahan	Rp 28.440.361.500	Rp 28.429.350.481	99,96
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp 24.100.000	Rp 24.098.975	100,00
							Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Rp 40.058.600	Rp 33.001.400	82,38
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Temindung Permai)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 2.789.400.000	Rp 2.789.400.000	100,00
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sungai Pinang Dalam)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 8.047.400.000	Rp 8.047.400.000	100,00
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bandara)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 2.081.500.000	Rp 2.081.500.000	100,00
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunung Lingai)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 1.661.500.000	Rp 1.659.190.000	99,86

						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mugirejo)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 3.069.400.000	Rp 3.069.399.950	100,00
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Temindung Permai)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan	Rp 1.697.913.800	Rp 1.697.913.682	100,00
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Pinang Dalam)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan	Rp 4.871.994.000	Rp 4.871.994.000	100,00
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bandara)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan	Rp 4.275.756.400	Rp 1.275.449.296	29,83
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gunung Lingai)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan	Rp 1.014.562.000	Rp 1.013.980.500	99,94
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mugirejo)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan	Rp 1.866.776.700	Rp 1.866.550.173	99,99
						Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang dibina	Rp 350.000.000	Rp 349.361.482	99,82
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Sungai Pinang)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 100.000.000	Rp 99.658.000	99,66
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Temindung Permai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100,00
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 49.982.241	99,96
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Bandara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 49.999.241	100,00
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Gunung Lingai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 49.924.000	99,85

						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Mugirejo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp	50.000.000	Rp	49.798.000	99,60
							JUMLAH	Rp	58.389.931.962	Rp	56.910.189.723	97,47

